

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan, DKI Jakarta masih belum terbebas dari masalah kemiskinan. Kota administrasi dengan angka kemiskinan terendah yaitu Jakarta Selatan dengan angka kemiskinan 3,1% pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena Jakarta Selatan mengalami peningkatan angka urbanisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan. Jakarta Selatan juga memiliki Garis kemiskinan (GK) yang tinggi dan paling tinggi di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp792.684/kapita/bulan pada tahun 2021, Rp842.630/kapita/bulan tahun 2022, dan Rp891.580/kapita/bulan pada tahun 2023 (BPS Provinsi DKI Jakarta).

Garis Kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang harus dimiliki untuk mencukupi standar kebutuhan hidup. Untuk itu, penduduk dengan pengeluaran konsumsi rata-ratanya di bawah garis kemiskinan maka termasuk ke dalam kategori penduduk miskin. Semakin tinggi garis kemiskinan maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang artinya kemiskinan akan semakin besar.

Konsep pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan daripada memberi bantuan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dan membuat mereka terus bergantung pada bantuan tersebut. Akar permasalahan kemiskinan menurut Dr. Oos M. Anwas dalam

bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Era Global” (2017), terletak pada individu atau masyarakat itu sendiri. Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk hidup mandiri.

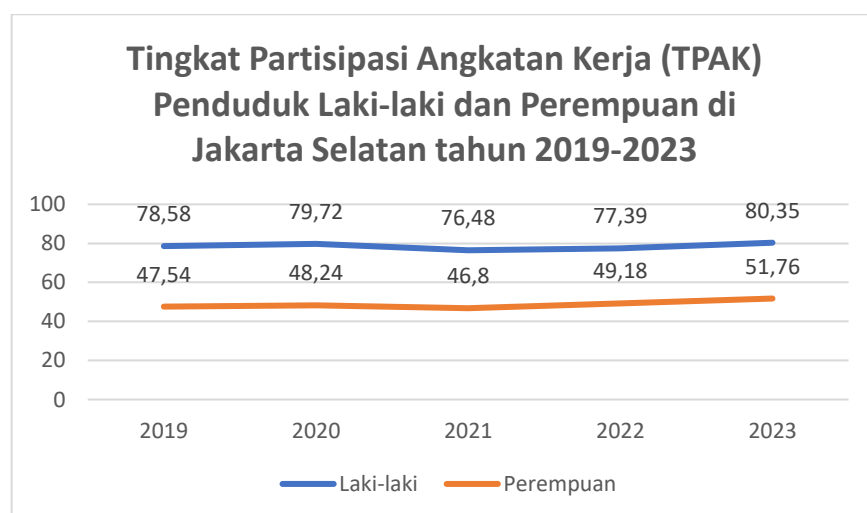
Salah satu bentuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah dengan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pembangunan yang berorientasi pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan, masyarakat diajak untuk berpartisipasi mulai dari pembuatan keputusan, proses perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan pembangunannya. Dalam kata lain, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Langkah memberdayakan masyarakat miskin salah satunya yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, termasuk kesetaraan gender untuk mencapai partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik, khususnya pada kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dinilai penting untuk mengurangi kemiskinan sebab menurut data MDG's (2010), dari seluruh penduduk di dunia, sepertiganya hidup di bawah garis kemiskinan, 70 persen diantaranya adalah perempuan (Ganiem, 2017). Akan tetapi, program pengentasan kemiskinan

selama ini lebih sering mengesampingkan unsur perempuan padahal perempuan menjadi entitas paling terdampak dari kemiskinan. Persepsi yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik seringkali menjadi penghalang bagi pengakuan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kabeer (2020) perempuan yang berdaya secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan gizi dan kesehatan, serta meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Berdasarkan studi Wei et al., (2021) pemberdayaan perempuan memberikan dampak yang sangat baik bagi penurunan kemiskinan dan kemiskinan multidimensi. Namun pada kenyatannya, akses perempuan dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi masih menunjukkan ketimpangan dengan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Jakarta Selatan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Jakarta Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

Grafik tersebut memperlihatkan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Jakarta Selatan yang berpartisipasi dalam dunia kerja. Terlihat bahwa masih adanya kesenjangan yang nyata atas kesempatan bekerja yang diterima laki-laki dan perempuan. Kemudahan perempuan untuk mendapatkan akses ekonomi berupa pekerjaan profesional sudah seharusnya diperluas. Menurut studi Kabeer dan Wahab dalam Reshi & Sudha (2023) pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan gizi dan kesehatan, serta meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan seharusnya menjadi urgensi pemerintah sebab persentase penduduk perempuan di Indonesia pada tahun 2023 hampir memenuhi setengah populasi yaitu sekitar 49,92% sehingga apabila perempuan tidak berdaya maka hanya akan menjadi beban pembangunan, bukan potensi sumber daya pembangunan. Oleh sebab itu, menjadikan perempuan berdaya akan memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi perekonomian, negara, dan juga lingkungan.

Salah satu program penanggulangan angka kemiskinan yang berfokus pada upaya pengembangan kemampuan masyarakat untuk mencapai perekonomian yang lebih stabil yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah berskala nasional yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. PNPM

Mandiri Perkotaan sendiri merupakan program adopsi dari program pengentasan kemiskinan di perkotaan sebelumnya yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP.

PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah rencana yang dibuat pemerintah yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha-usaha produktif. Perbedaan PNPM dengan program pengentasan kemiskinan lainnya adalah PNPM bersifat reaktif dan strategis dimana institusi masyarakat diberdayakan dan terus dikembangkan agar mencapai kemandirian dan keluar dari status miskin (Suharsono et al., 2019) sebab PNPM menyadari bahwa akar kemiskinan berasal dari sikap dan perilaku seseorang maupun masyarakat yang jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan (Nugroho & Santosa, 2013).

Kemiskinan selama ini diselesaikan dengan cara parsial dan sektoral yang mengakibatkan bantuan dari pemerintah berakhir tidak tepat sasaran, menciptakan cikal bakal fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai modal sosial di masyarakat. Oleh karena itu, PNPM hadir sebagai solusi karena PNPM Mandiri Perkotaan membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk memberikan pendapat, menilai, menentukan program pemberdayaan, melaksanakan program, hingga mengawasi dan mengevaluasi program.

Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin pada Setiap Kecamatan di Jakarta Selatan

No	Kecamatan	Persentase Jumlah Penduduk Miskin
1.	Jagakarsa	17,5%
2.	Kebayoran Baru	6,6%
3.	Kebayoran Lama	9,4%

4.	Cilandak	8,8%
5.	Pancoran	8,8%
6.	Pesanggrahan	12%
7.	Pasar Minggu	12%
8.	Mampang Prapatan	11%
9.	Tebet	8,4%
10.	Setia Budi	5,8%

Sumber: Data rekap DTKS Wilayah Jakarta Selatan Sesuai SK 19 Mei 2023

Tabel tersebut memperlihatkan banyaknya penduduk miskin pada setiap kecamatan di Jakarta Selatan. Kecamatan dengan penduduk miskin paling banyak yaitu kecamatan Jagakarsa dengan total 189.467 penduduk miskin atau sebanyak 17,5%. Kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak selanjutnya yaitu Kecamatan Pesanggrahan dengan total penduduk miskin sebanyak 131.769 atau 12% dan Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 131.768 penduduk miskin atau 12%.

Tabel 1. 2 Jumlah KPM PKH Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah KPM PKH	Persentase
1.	Jagakarsa	5.854	20%
2.	Kebayoran Baru	2.592	8,8%
3.	Kebayoran Lama	2.561	8,7%
4.	Cilandak	2.007	6,8%
5.	Pancoran	2.603	8,8%
6.	Pesanggrahan	2.204	7,6%
7.	Pasar Minggu	4.230	14%
8.	Mampang Prapatan	3.541	12%
9.	Tebet	2.967	10%
10	Setia Budi	973	3,3%

Sumber: Koordinator Kota Jakarta Selatan Program Keluarga Harapan

Angka kemiskinan di Kecamatan Jagakarsa juga dapat dilihat dari jumlah KPM atau Keluarga Penerima Manfaat dalam Program Keluarga Harapan. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah KPM terbanyak yaitu Kecamatan Jagakarsa sebanyak 5.854 KPM dengan persentase 20%. Hal

tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara Data Rekap DTKS Wilayah Jakarta Selatan yang menunjukkan jumlah penduduk miskin setiap kecamatan dengan data Koordinator Kota Jakarta Selatan Program Keluarga Harapan tentang jumlah KPM PKH di setiap kecamatan.

Tabel 1. 3 Jumlah KPM Pada Setiap Kelurahan di Kecamatan Jagakarsa

No	Kelurahan	Jumlah KPM	Persentase
1.	Lenteng Agung	1.344	23%
2.	Tanjung Barat	648	11%
3.	Ciganjur	724	12%
4.	Jagakarsa	1.302	22%
5.	Cipedak	774	13%
6.	Srengseng Sawah	1.062	18%

Sumber: Koordinator Kota Jakarta Selatan Program Keluarga Harapan

Kecamatan Jagakarsa sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk miskin paling banyak dan kecamatan dengan jumlah KPM PKH terbanyak di Jakarta Selatan di dalamnya terdapat enam kelurahan, yaitu Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, dan Kelurahan Srengseng Sawah. Dari keenam kelurahan tersebut, kelurahan dengan jumlah KPM terbanyak yaitu Kelurahan Lenteng Agung dengan jumlah 1.344 KPM dengan persentase 23%.

Kelurahan Lenteng Agung merupakan salah satu dari enam kelurahan di Kecamatan Jagakarsa dengan jumlah penduduk sebanyak 120.000 jiwa pada 2022 dan menjadi kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jagakarsa. Kepadatan penduduk yang tinggi tersebut membuat tingginya angka kemiskinan di Kelurahan Lenteng Agung yang ditandai dengan banyaknya KPM atau keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah satu komunitas perempuan di Kelurahan Lenteng Agung adalah komunitas kerajinan yang terhimpun dalam program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) bernama UP2K Erwela. Erwela sendiri diambil dari lokasi komunitas tersebut yang berada di RW Delapan, Kelurahan Lenteng Agung. UP2K Erwela bergerak dalam bidang pemberdayaan kelompok perempuan berbasis pengembangan usaha, khususnya dalam sektor kerajinan rajut.

Gambar 1. 1 Hasil Produksi Komunitas Rajut Erwela



Sumber: Okezone Lifestyle

UP2K Erwela terbentuk pada tahun 2018 dimana usaha awalnya berupa pengolahan atau daur ulang barang-barang bekas menjadi kerajinan. Heni Nuryani selaku ketua UP2K Erwela mengungkapkan bahwa kini UP2K Erwela sudah merambah ke kerajinan rajut karena mengikuti kemajuan teknologi. Namun, pada mulanya, hanya ada satu anggota UP2K Erwela yang mengetahui cara merajut, sedangkan anggota lainnya belum bisa. Untuk itu, satu anggota yang mampu merajut tersebut diminta untuk berbagi ilmu merajutnya kepada anggota yang lain. Saat ini, UP2K Erwela sudah memproduksi barang-barang rajut, seperti tas, topi, dompet, tempat ponsel, hingga taplak meja.

Komunitas pemberdayaan lain yang ada di Kelurahan Lenteng Agung adalah Komunitas Rumah Batik Kolalen. Komunitas ini merupakan komunitas pemberdayaan perempuan, khususnya bagi ibu rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Komunitas Rumah Batik Kolalen sudah mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan Lenteng Agung dengan mengadakan pelatihan membatik dan memasarkan batik tersebut melalui media online. Lurah Lenteng Agung memberi perhatian yang besar pada Komunitas Rumah Batik Kolalen karena komunitas ini berhasil memperkenalkan desain batik khas Lenteng Agung (Iqbaludin, 2022).

Komunitas Bank Sampah Berlian dapat dikatakan sudah berhasil serta dikelola secara berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah adanya struktur organisasi yang jelas dari Bank Sampah Berlian. Selain itu, Bank Sampah Berlian juga sudah memiliki logonya sendiri untuk branding yang kuat, didampingi oleh WatSan Action Yayasan Tirta Lestari, dibina oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, dan didukung oleh Building Trust Sika (Perdana, 2015). Hal di atas menunjukkan bahwa Komunitas Bank Sampah Berlian di RW 04 Kelurahan Lenteng Agung sudah kuat dari berbagai aspek, terlebih adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Tirta Lestari untuk keberlanjutan kegiatan di Bank Sampah Berlian. Dampak yang diberikan dari kegiatan tersebut yaitu tambahan penghasilan bagi anggota komunitas, berkurangnya banjir dan wabah penyakit, meningkatnya keterampilan akibat pelatihan keterampilan membuat kerajinan dari sampah secara gratis dari

Yayasan Tirta Lestari, dan berubahnya pola pikir masyarakat tentang sampah (Perdana, 2015).

Sementara itu, komunitas rajut Erwela belum mendapat perhatian yang besar dari pemerintah Kelurahan Lenteng Agung. Hal tersebut ditandai dengan masih terkendalanya produksi karena masalah pendanaan dan permodalan, kurangnya sumberdaya alat yang tersedia, juga tingkat promosi yang masih kurang. Saat ini, modal yang digunakan untuk produksi masih berasal dari dana masing-masing anggota sehingga kapasitas produksi masih belum dapat ditingkatkan. Komunitas Rajut Erwela juga belum memiliki pondasi yang kuat seperti logo, pendampingan, dukungan, dan pembinaan dari pihak lain sebagaimana Komunitas Bank Sampah Berlian di RW 04 Kelurahan Lenteng Agung.

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela di Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan di Komunitas Rajut Erwela.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan di DKI Jakarta yang belum memprioritaskan pembangunan manusia.

2. Penanggulangan kemiskinan yang masih parsial dan sektoral yang mengakibatkan bantuan dari pemerintah berakhir tidak tepat sasaran
3. Kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Jakarta Selatan.
4. Komunitas rajut Erwela masih tertinggal dari komunitas pemberdayaan lain di Kelurahan Lenteng Agung.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela yang dilaksanakan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela yang dilaksanakan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah manfaat secara praktis dan akademis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk masukan bagi pemerintah agar lebih serius dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan. Masyarakat yang berdaya akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembahasan bagi lembaga-lembaga yang menaungi masalah kemiskinan dan pemberdayaan, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau pun lembaga lainnya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat miskin dan serius dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian, penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan tentang kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.6.1 State of The Art

Beberapa penelitian sebelumnya disusun untuk menjadi dasar dan pembeda dari berbagai kajian. Penelitian Suharsono et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa dengan modal usaha yang diberikan sebesar Rp2 juta hingga Rp18 juta melalui PNPM, kemampuan usaha dan pengembangan usaha produktif KSM Tlogosari berhasil ditingkatkan. Lain halnya dengan penelitian Firdausi (2020) kendala yang dihadapi pada pemberdayaan perempuan di Desa Campurejo pada pelatihan Batik Shibori karena peserta pemberdayaan belum percaya diri dalam menghasilkan produk hasil karyanya untuk dijadikan usaha

Namun demikian, pemberdayaan perempuan juga memberikan hasil yang diharapkan seperti dalam penelitian Hamzah (2019) dalam penelitiannya pada masyarakat miskin di Desa Mandalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah bahwa terbukanya kesadaran masyarakat khususnya perempuan bahwa keadaan kesejahteraan dapat diubah dengan kemauan pribadi dan tekad yang kuat, peningkatan kapasitas diri, bertambahnya kecakapan pribadi tentang *home industry*. Penelitian Rapii & Wahdatussopia (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, serta berhasil menurunkan angka kemiskinan. Keterampilan tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan produksi sehingga terjadi peningkatan ekonomi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Wei et al. (2021) bahwa pemberdayaan

perempuan di Bangladesh berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan kemiskinan. Adapun penanggulangan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan penelitian Firdaus (2019) sudah berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan koordinasi dari semua pihak yang terlibat. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) lebih banyak mengalami kendala, seperti pada penelitian Lestari (2022) bahwa hambatan pelaksanaan program SPP di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat usaha produktif, sikap individualis, dan kurangnya kedisiplinan ibu-ibu SPP dalam menyetor cicilan, serta kendala besaran biaya yang dapat dipinjam oleh masyarakat.

Beberapa penelitian tentang pemberdayaan perempuan telah dilakukan di Jakarta Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2021) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal (Studi Batik Betawi Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan)” menunjukkan bahwa pada prosesnya, pemberdayaan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap penyadaran melalui sosialisasi, tahap transformasi pengetahuan melalui pelatihan membatik, dan tahap peningkatan intelektualitas melalui inovasi-inovasi dari masyarakat itu sendiri. Hasilnya bahwa pemberdayaan perempuan ini telah meningkatkan kapasitas perempuan Terogong serta meningkatkan keberdayaan ekonomi para pengrajin batik. Penelitian lain yang ditulis oleh Wulandari (2018) menggunakan tahap pemberdayaan yang mirip dengan penelitian sebelumnya, pemberdayaan ibu rumah tangga dengan produk bir pletok telah memberikan

tambahan pendapatan setiap bulannya, yaitu sebesar Rp200.000 – Rp400.000. Akan tetapi, tambahan pendapatan tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan.

Penelitian lainnya di Jakarta Selatan yaitu penelitian Iqbaludin (2022) mengungkapkan bahwa program pemberdayaan ibu rumah tangga melalui Komunitas Batik Kolalen di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, telah berhasil. Ketekunan para pembatik dan dukungan pemerintah menjadi kunci keberhasilan, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan bahan baku dan pemasaran.. Ibu-ibu menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami. Di Kelurahan Lenteng Agung juga terdapat Komunitas Bank Sampah Berlian yang berada di RW 01 dalam penelitian Perdana, (2015). Penerapan teori tahapan pemberdayaan Isbandi Rukmino Adi, yang meliputi persiapan, pengkajian, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meminimalisir masalah sampah, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian mengenai perbandingan tersebut, maka peneliti melakukan pembaruan pada teori yang dipakai dan lokus penelitian yang diambil, yaitu diskursus teori tahapan pemberdayaan antara lain (1) tahap persiapan; (2) tahap penyadaran; (3) tahap pengkapasitasan; dan 4) tahap pelaksanaan program. Lokus dalam penelitian yaitu di RW 08 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meskipun ada kesamaan lokus dengan penelitian Iqbaludin (2022), yang menjadi pembeda adalah penelitian

tersebut lebih difokuskan pada Komunitas Batik Kolalen yang berlokasi di RW 01, sedangkan penelitian ini fokus pada Komunitas Rajut Erwela yang berada di RW 08 beserta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemberdayaan tersebut. Penelitian ini sekaligus untuk menilai bahwa di kelurahan yang sama, apakah pelaksanaan pemberdayaan sudah merata, apakah sudah terjadi peningkatan pendapatan yang merata, dan apakah pemerintah kelurahan sudah memberikan perhatian yang sama pada setiap komunitas yang ada di kelurahan tersebut.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Artikel, Tahun Artikel	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
1	Rani, M. C. (2021). <i>Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal (Studi Batik Betawi Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan)</i>	Menganalisis proses pemberdayaan yang dilakukan oleh batik Betawi Terogong dan untuk mengetahui hasil yang diperoleh pengrajin perempuan selama bergabung dalam industri rumahan tersebut.	Teori tahap pemberdayaan Ambar Teguh Sulistiyani: a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; b. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan; c. Tahap peningkatan	Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	Proses pemberdayaan perempuan di Batik Betawi Terogong berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu penyadaran, transformasi, dan peningkatan intelektualitas. Pada tahap awal, fokus diberikan pada peningkatan kesadaran akan potensi diri dan pentingnya peran perempuan dalam perekonomian. Tahap kedua berupa transfer pengetahuan dan keterampilan membuat batik, sedangkan tahap akhir mendorong inovasi dan kreativitas

			kemampuan intelektual. Teori keberhasilan pemberdayaan Schuler, Hashemi, dan Riley.		untuk mencapai kemandirian ekonomi.
2	Suharsono, S., Muchsin, B., & Afifuddin, A. (2019). Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif (studi kasus program PNPM di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).	Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan PNPM dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.	Teori analisis kualitatif Milles and Hubberman dan Saldana (2014).	Kualitatif, purposive sampling, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Bantuan modal yang diberikan kepada KSM Tlogomas ditujukan untuk menunjang aktivitas dan usaha produktif, mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan KSM Tlogomas. Bantuan yang diberikan sebesar Rp2 juta hingga Rp18 juta dalam jangka waktu 1-5 tahun. Adapun program ini telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan usaha produktif dari KSM Tlogosari.
3	Iqbaludin, S. (2022) <i>Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Komunitas Rumah Batik Kolalen di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.</i>	Untuk menganalisis proses pemberdayaan ibu rumah tangga yang dilakukan oleh Komunitas Rumah Batik Kolalen, mengetahui faktor pendukung dan	Teori proses pemberdayaan Adi Fahrudin: a. Pemungkinan; b. Penguatan; c. Perlindungan.	Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara,	Penerapan teori pemberdayaan Adi Fahrudin pada Komunitas Batik Kolalen telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian para pembatik. Tahapan persiapan yang matang, meliputi sosialisasi dan pendaftaran anggota, menjadi

		penghambat dari proses pemberdayaan tersebut, dan mengetahui hasil yang diperoleh oleh pembatik dan masyarakat sekitar dari pemberdayaan ibu rumah tangga oleh Komunitas Batik Kolalen.	Teori proses pemberdayaan Wrihatnolo: - Penyadaran; - Pengkapasitasan; - Pemberian Daya; Indikator pemberdayaan ekonomi perempuan Gunawan Sumodiningrat (1999).	observasi, dan dokumentasi.	fondasi yang kuat bagi keberhasilan program. Meskipun terdapat beberapa kendala operasional, seperti keterbatasan bahan baku dan jaringan distribusi, namun semangat dan ketekunan para pembatik, serta dukungan pemerintah setempat, telah mampu mengatasi tantangan tersebut.
4	Nisa, S. F. (2020). <i>Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pada Pelatihan Batik Shibori Di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.</i>	Untuk menganalisis proses dan peran pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pelatihan batik Shibori di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.	Teori proses pemberdayaan Wilson: - Penyadaran - Pemahaman - Pemanfaatan - Penggunaan Teori peran pemberdayaan Abdul Basith: <i>Authority</i> <i>Confidence and Competence</i> <i>Trust</i> <i>Opportunity</i> <i>Responsibility</i>	Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan batik di Desa Campurejo, Ponorogo, belum berhasil mendorong kemandirian ekonomi secara optimal. Meskipun pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, namun kurangnya kepercayaan diri peserta dalam memasarkan produk menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan program.

			f. <i>Support</i>		
5	Perdana, N. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah oleh Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung.	Untuk menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan melalui kegiatan daur ulang sampah yang dilakukan di Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung, serta manfaat pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah ini.	Teori pengentasan kemiskinan melalui penguatan kaum perempuan.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, dan teknik analisis datanya menggunakan analisa dana <i>purposive samping</i> .	Penerapan teori tahapan pemberdayaan Isbandi Rukmino Adi, yang mencakup persiapan, pengkajian, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meminimalisir masalah sampah, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
6	Rapii, M. (2020). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah Kecamatan Aikmel dalam bidang usaha mandiri.	Untuk mengidentifikasi gambaran pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah Kecamatan Aikmel dalam bidang usaha mandiri.		Deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel secara <i>simple random</i> . Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Kondisi kemiskinan yang tidak mendapat penanganan yang tepat hanya akan membuat perempuan terus terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan. Pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Aikmel melalui indikator keberhasilan pelatihan yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan warga serta meningkatnya pendapatan hasil usaha. Program pemberdayaan perempuan juga menjadi keberlanjutan dengan adanya

					pengembangan produk atau variasi produk dan terbentuknya kemandirian.
7	Wulandari, Syifa. (2018). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Komunitas Insan Berdaya Kampung Muara (Studi Kasus RW 03 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan).	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlunya pemberdayaan bagi ibu rumah tangga terkait lemahnya perekonomian keluarga dan mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan Komunitas Insan Berdaya Kampung Muara melalui wirausaha bir pletok dan pelatihan berkebun.	Teori proses pemberdayaan Oos M. Anwas. Teori indikator keberhasilan pemberdayaan UNICEF.	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pada tahap awal pemberdayaan, ibu-ibu rumah tangga disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yaitu mengembangkan produk bir pletok. Mereka kemudian diberikan pelatihan berkebun dan penguatan kemampuan keterampilan. Masyarakat yang telah berhasil dan berprestasi dalam perubahan kemudian diberi <i>reward</i> sebagai apresiasi. Dari pemberdayaan ini, berhasil memberikan tambahan pendapatan bagi ibu rumah tangga dimana setiap bulannya mereka mendapatkan Rp200.000 – Rp400.000. Akan tetapi pendapatan tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan.
8	Hamzah, N. (2019). Pemberdayaan perempuan miskin pesisir melalui	Untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan kepada	Teori pengentasan kemiskinan melalui penguatan kaum perempuan.	FGD dan observasi.	Terbukanya kesadaran masyarakat khususnya perempuan bahwa keadaan kesejahteraan dapat diubah dengan kemauan pribadi dan tekad

	penguatan industri kecil rumah tangga (Study pada perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat).	kelompok sasaran yakni perempuan dengan keterbatasan ekonomi di Desa Mandalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.			yang kuat, peningkatan kapasitas diri, bertambahnya kecakapan pribadi tentang <i>home industry</i> .
9	LESTARI, D. O. (2022). Strategi Pnpm Mandiri Dalam Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.	Menganalisis strategi PNPm Mandiri dalam memberdayakan kelompok masyarakat melalui program SPP serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program SPP di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.	PNPM Mandiri Perkotaan dan teori faktor penghambat pelaksanaan program.	Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) didasarkan pada prinsip-prinsip konsensus, pendampingan, dan perumusan tujuan yang jelas. Kendala utama dalam implementasi program ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan produktif, sikap individualisme anggota, kurangnya disiplin dalam pembayaran angsuran, serta keterbatasan jumlah pinjaman yang dapat diakses.
10	Akhyar, A., & Firdaus, F. (2019). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penanggulangan	Implementasi program dan teori faktor penghambat implementasi program.	Deskriptif kualitatif dan dengan metode pengamatan peserta,	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Raba, Kota Bima, khususnya dalam bidang lingkungan, telah berjalan

	Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perkotaan.	kemiskinan dan faktor penghambat PNPM Mandiri Perkotaan.		wawancara, observasi, dan dokumentasi.	efektif berkat sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Pemerintah Kota Bima turut berperan aktif dalam pengawasan dan memberikan dukungan finansial melalui skema dana sharing untuk berbagai kegiatan fisik di tingkat kelurahan.
11	Wei, W., Sarker, T., Żukiewicz-Sobczak, W., Roy, R., Alam, G. M., Rabbany, M. G., ... & Aziz, N. (2021). The influence of women's empowerment on poverty reduction in the rural areas of Bangladesh: Focus on health, education and living standard.	Untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan yang berfokus pada deprivasi rumah tangga dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di Bangladesh.	<i>Indicators of Women's Empowerment:</i> <i>a. Household Decision-Making Power</i> <i>b. Gender Attitude and Beliefs</i> <i>c. Physical Mobility</i> <i>d. Control over Resources</i> <i>e. Relative Freedom from Domination by the Family</i> <i>f. Measuring the Poverty Status of Household</i> <i>g. Measuring Income Poverty</i>	<i>Descriptive statistics, logistic regression, and ordinary least squares models.</i>	Skor pemberdayaan perempuan di Bangladesh berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan juga mengurangi kemiskinan multidimensi secara signifikan. Sedangkan kekerasan gender dapat menyebabkan penurunan pendapatan perkapita yang cukup besar dan meningkatkan kemiskinan multidimensi.

12	Rui, G. U., & NIE, F. Y. (2021). Does empowering women benefit poverty reduction? Evidence from a multi-component program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China.	Untuk menentukan dampak program multikomponen terhadap pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, serta mengeksplorasi dampaknya peran perempuan yang diberdayakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Ulanqab, Mongolia	1. <i>Propensity Score Matching</i> (PSM) 2. <i>Inverse Probability Weighting</i> (IPW) 3. <i>Difference in Difference</i> (DID)	<i>The dataset used in this study was collected in nine poor counties of Ulanqab City in the Inner Mongolia Autonomous Region of China at the end of 2014, yielding a sample of 900 households.</i>	Program multikomponen memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan secara bersamaan. Perempuan yang menjadi penerima manfaat juga telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan standar hidup rumah tangga.
13	Shafira, A. A., & Nugroho, F. (2022). individual empowerment family beneficiaries of the Program Keluarga Harapan Doing Independent Graduation in Depok City.	<i>To describe the individual empowerment of PKH's beneficiaries in Depok City.</i>	<i>Internal and External Characteristic of PKH:</i> 1. <i>Knowledge</i> 2. <i>Self-Assurance</i> 3. <i>Decision making-ability</i> 4. <i>Social Support</i>	<i>This research employs a qualitative approach, emphasizing the depth of data to determine the quality of research results.</i>	KPM yang telah lulus dari kemiskinan dan menjadi mandiri memiliki pengetahuan dan keinginan yang kuat untuk belajar bisnis/pekerjaan baru. Mereka menyadari tidak selamanya bisa bergantung kepada bantuan pemerintah. Mereka juga telah mampu membuat Keputusan sendiri dalam rumah tangganya, mendapat dukungan dari keluarga, lingkungan hidup, dan pemerintah berupa penyederhanaan perizinan dan

					bantuan materil pendanaan usaha pendampingan.
14	Setiawan, H. H., Nuryana, M. M., Susantyo, B., Purwanto, A. B., & Sulubere, M. B. (2021, April). Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) toward sustainable development.	Untuk menemukan model kewirausahaan sosial bagi PKM menuju pembangunan berkelanjutan.	<i>Theory of business journey, the parties involved and the social entrepreneurship model aimed at sustainable development.</i>	<i>The type of research used is qualitative. Data collection with interview, FGD, and documentation studies.</i>	Program kewirausahaan untuk penerima PKH tidak selalu berhasil. Banyak pihak yang terlibat, seperti keluarga, pemerintah, dan lembaga keuangan. Agar berhasil, pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen penuh, membuat peraturan yang mendukung, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, para pengusaha sosial juga perlu dibantu untuk terus berinovasi.
15	Achmad, W., Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Sumadinata, R. W. S. (2022). Women's Social Capital for Empowering Poor Households.	Untuk menganalisis fungsi modal perempuan dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga berpendapatan rendah.	<i>Social Capital in PKH</i>	<i>A qualitative rese.arch approach is a method-based study and understanding process that analyzes a social phenomenon or human problem</i>	Status ekonomi keluarga berpenghasilan rendah dapat ditingkatkan oleh perempuan dengan memanfaatkan stok modal sosialnya berupa kepercayaan, nilai dan norma sosial, timbal balik, dan jaringan sosial di lingkungan sosial, seperti acara sosial, forum pengajian, dan didirikannya koperasi. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui penyelenggaraan usaha kecil dan mikro.

1.6.3 Administrasi Publik

1.6.3.1 Pengertian Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1988: 29-30) mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah proses sistematis dalam mengelola sumber daya dan personel pemerintah untuk melakukan formulasi, implementasi, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Sementara itu menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (dalam Syafie, 2006: 23) pengertian administrasi publik yaitu : 1) Proses penerapan kebijakan publik yang disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat; 2) Koordinasi berbagai pihak untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah; dan 3) Proses ini menggunakan berbagai teknik manajemen agar tujuannya tercapai.

Adapun Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) mengatakan bahwa administrasi publik adalah harmonisasi antara praktek dan juga teori yang bertujuan untuk mengkaji relasi antara negara dan masyarakatnya, serta mendorong kebijakan pemerintah yang responsif terhadap dinamika sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik merupakan upaya pemerintah meliputi kegiatan manajerial untuk memenuhi segala kebutuhan publik dengan responsif dan memanfaatkan seluruh sumber daya dan personel publik secara efektif dan efisien.

1.6.3.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1998) menjelaskan bahwa paradigma administrasi negara sudah mengalami pergeseran sebanyak enam kali. Keenam paradigma tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Paradigma 1 (1900-1926): Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi

Goodnow dan White (1900) adalah tokoh utama yang memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi politik yang berfokus pada pembuatan kebijakan berdasarkan kehendak rakyat. Kedua, fungsi administrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Pembagian tugas ini melahirkan tiga cabang kekuasaan utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Paradigma 2 (1927-1937): Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi

Berbeda dengan paradigma sebelumnya yang lebih menekankan aspek lokus, paradigma ini justru lebih menekankan fokusnya. Fokus dari paradigma 2 adalah prinsip-prinsip administrasi yang dikenal dengan POSDCORB atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting.

3. Paradigma 3 (1950-1970): Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Terjadi pertentangan mengenai *value free* dengan *value-laden politics*. *Value-laden politics* ternyata lebih jelas prakteknya di lapangan sehingga memunculkan teori baru bahwa teori administrasi publik juga merupakan teori politik atau ilmu politik yang menempatkan birokrasi pemerintahan

sebagai lokusnya. Sementara itu, fokusnya menjadi bias sebab menurutnya terdapat berbagai kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi.

4. Paradigma 4 (1956-1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi
Paradigma ini kembali mengkaji dan mengembangkan prinsip-prinsip administrasi yang telah ada sebelumnya termasuk menganalisis perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan lainnya yang menjadi fokus dalam paradigma ini.
5. Paradigma 5 (1970-): Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik
Jika paradigma-paradigma sebelumnya selalu menekankan pada satu aspek saja, maka dalam paradigma ini, antara aspek fokus dan aspek lokus sudah jelas. Teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik terdapat di dalam aspek fokus, sedang aspek lokus yaitu masalah-masalah serta segala hal yang menjadi kepentingan publik.
6. Paradigma 6 (-sekarang): Governance
Cheema (2007) berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang baik agar semua orang bisa hidup nyaman dan aman. Sektor swasta punya peran penting dalam menyediakan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian negara. Sementara itu, masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

1.6.4 Manajemen Publik

1.6.4.1 Pengertian Manajemen Publik

Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam T. Keban, 2019:108-109) menjelaskan keunikan manajemen publik. Ia menggabungkan berbagai aspek, mulai dari cara mengelola organisasi secara efisien hingga mempertimbangkan faktor politik dalam pengambilan keputusan. Manajemen publik bukan hanya tentang teori, tapi juga praktik sehari-hari dalam pemerintahan.

Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam T. Keban, 2019: 109) melanjutkan bahwa kebijakan publik seperti otak yang memberikan perintah, menentukan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, manajemen publik seperti jantung yang menjalankan perintah tersebut dengan mengelola semua sumber daya yang ada. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laurence Lynn (dalam Wijaya dan Danar, 2014) manajemen publik digambarkan sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Pertama, seni, yang berarti kita perlu kreatif dan bisa berpikir di luar kotak untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kedua, ilmu, yang artinya kita harus menggunakan metode yang sistematis dan rasional. Ketiga, profesi, yang berarti kita harus memiliki keahlian khusus dan etika yang tinggi untuk melayani masyarakat.

1.6.4.2 Paradigma Manajemen Publik

A. Old Public Administration (OPA)

Konsep Old Public Administration (OPA) menurut Woodrow Wilson (dalam T. Keban, 2019:280) adalah seperti membagi tugas antara politik dan pemerintahan. Pemerintah harus fokus pada memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang profesional dan efektif. Selain itu, pemerintah harus punya struktur organisasi yang jelas agar bisa bekerja dengan baik.

Adapun karakteristik Old Public Administration (OPA) menurut Dendhart dan Dendhart (2007: 11-12) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik terbaik melalui lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Kebijakan publik dan administrasi publik dipandang sebagai suatu proses yang sangat terstruktur karena ada satu pendekatan yang dipercaya paling optimal untuk setiap masalah.
3. Administrator publik hanya menjalankan kebijakan yang sudah dibuat, mereka tidak ikut serta dalam membuat kebijakan.
4. Administrator publik harus patuh pada perintah pejabat politik dan tidak memiliki banyak kebebasan dalam mengambil keputusan.
5. Administrator publik bertanggung jawab kepada pemimpin yang dipilih oleh rakyat.
6. Pemerintah memiliki struktur organisasi yang jelas dimana atasan memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan.
7. Pemerintah selalu berusaha untuk bekerja seefisien dan serasional mungkin.

8. Partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan sangat terbatas karena sistem organisasi publik adalah tertutup.
9. Tugas utama administrator publik adalah merencanakan, mengorganisir, merekrut pegawai, memberikan arahan, mengkoordinasikan, membuat laporan, dan mengelola anggaran.

B. New Public Management (NPM)

NPM muncul karena banyak orang merasa cara kerja pemerintah yang lama (OPA) terlalu kaku dan tidak efisien. Maka dari itu, NPM mencoba menerapkan cara kerja perusahaan swasta yang lebih fleksibel ke dalam pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah lebih cepat, lebih pintar, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terdapat enam dimensi kunci dari paradigma NPM menurut Kettle (dalam T. Keban, 2019: 283), yaitu:

1. *Productivity*, yaitu upaya pemerintah untuk bekerja lebih efisien dengan menghasilkan lebih banyak *output* tetapi biaya yang dikeluarkan lebih rendah;
2. *Marketization*, yaitu upaya pemerintah untuk membuat sistem kerja yang lebih kompetitif sebagaimana sistem kerja di perusahaan swasta agar lebih efisien dan menghindari masalah-masalah birokrasi yang sering terjadi;
3. *Service orientation*, yaitu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan lebih memperhatikan kebutuhan mereka;

4. *Decentralization*, yaitu upaya pemerintah untuk memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah atau kepada pegawai yang langsung berinteraksi dengan masyarakat agar program-program pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat;
5. *Policy*, yaitu upaya pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan efektif; dan
6. *Performance accountability*, yaitu upaya pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan membuktikan bahwa program-programnya dapat berhasil.

C. New Public Service (NPS)

Melihat kritik NPM, paradigma NPS berusaha dan mendesak pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahannya. Masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan, tetapi dilihat sebagai warga masyarakat agar dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendali, serta percaya terhadap efektivitas kolaborasi (King dan Stivers, 1998).

NPS berpegang teguh pada semboyan *Citizen First!* yang diperkenalkan oleh Denhardt & Gray (1998). Denhardt & Denhardt (2000; 2003) memperkenalkan 7 prinsip NPS, yaitu:

1. Pelayan publik wajib hukumnya membantu masyarakat untuk maju dan terus berkembang.
2. Administrator publik bersama dengan masyarakat menentukan apa yang terbaik untuk kepentingan bersama.

3. Kebutuhan masyarakat dicapai dengan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Kepentingan publik bukan hanya perwujudan dari kepentingan pribadi, tetapi lebih pada nilai-nilai bersama yang disepakati oleh masyarakat.
5. Para pelayan publik tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi atau pasar, tetapi juga harus memberi perhatian hukum, nilai-nilai masyarakat, dan kepentingan warga.
6. Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat akan lebih berhasil jika mereka bekerja sama dan dipimpin oleh seseorang yang menghargai semua pihak.
7. Kepentingan publik harus diputuskan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, bukan oleh perseorangan yang mengejar keuntungan pribadi.

1.6.5 Pemberdayaan Perempuan

1.6.5.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok yang kurang berdaya, baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun kepercayaan diri, sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri dan memperbaiki kualitas hidupnya. (Priyono, S. Onny, dan Pranaka dalam Nur Afni, 2020).

Ginandjar Kartasasmita (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberi daya itu sendiri melalui motivasi,

dorongan, dan penyadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya menurut Slamet (2003), bahwa inti dari pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar lebih mandiri dengan cara meningkatkan kemampuan mereka, memberikan akses pada sumber daya yang mereka butuhkan, dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan.

Edi Suharto (2005:60) mendefinisikan Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memberdayakan individu atau kelompok agar mereka memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terkonsep, dan sistematis guna memberi daya pada kelompok lemah atau kelompok yang tertinggal agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya melalui motivasi, dorongan, dan penyadaran potensi yang dimiliki.

1.6.5.2 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Ma'arif dan Syafi'i (dalam Nur, 2019) pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan perempuan kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mencapai kesetaraan gender.

Ahmad & Sudha, n.d., (2022) pemberdayaan perempuan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam

mengendalikan hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang yang sama dengan laki-laki.

Selaras dengan pendapat di atas, Chattopadhyay (2005) juga mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai situasi dimana terjadi perpindahan keadaan perempuan dari keadaan tertindas menuju keadaan penindas dan tertindas sama-sama setara, baik secara sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk memberi daya atau kekuatan bagi perempuan agar dapat menggunakan hak-haknya, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menjadi setara dengan laki-laki dalam ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Riant Nugroho (dalam Dwijowijoto, 2008:164), beberapa tujuan pemberdayaan perempuan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai subjek atau partisipan aktif.
- b. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan untuk memperkuat partisipasi mereka dalam seluruh siklus proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- c. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan peluang kerja produktif.

Anwar (dalam Wulandari, 2018) juga menyebutkan tujuan-tujuan dari pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran perempuan dalam berkomunikasi dengan anggota masyarakat di luar sistem sosialnya.
- b. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh agen perubahan masyarakat wilayah itu sendiri.
- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kegiatan pembelajaran di lingkungan mereka.
- d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreativitas, dan aspirasi perempuan, khususnya keterampilan produktif.
- e. Tumbuhnya usaha-usaha produktif berbasis sosial budaya dalam bentuk industri rumah tangga yang diusahakan oleh perempuan dan hasilnya dapat dipasarkan.
- f. Tumbuhnya sikap kemandirian usaha atau sikap mental kewiraswastaan di kalangan perempuan.
- g. Tumbuhnya pola hidup hemat, dan adanya perencanaan keuangan keluarga.

1.6.5.3 Indikator Pemberdayaan

Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Edi Suharto (2009) mengemukakan delapan indikator pemberdayaan. Delapan indikator pemberdayaan tersebut dikenal sebagai empowerment index, yaitu: 1) Kebebasan mobilitas; 2) Kemampuan membeli komoditas kecil; 3)

Kemampuan membeli komoditas besar; 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam rumah tangga; 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga; 6) Memiliki kesadaran hukum politik; 7) Keterlibatan dalam kampanye yang melibatkan dalam permasalahan keluarga; dan 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

1.6.5.7 Tahapan Pemberdayaan

Beberapa ahli merumuskan tahapan dalam pemberdayaan yang harus dilakukan, salah satunya menurut Ambar Teguh Sulistiyani (dalam Cahya, 2021) bahwa tahapan pemberdayaan adalah:

1. **Penyadaran dan Pembentukan Perilaku**

Suatu perubahan yang berarti hanya bisa terjadi jika masyarakat sadar akan pentingnya perubahan dan bersedia untuk ikut serta dalam proses perubahan dengan cara meningkatkan kapasitas diri dan mengubah perilaku.

2. **Transformasi Pengetahuan dan Kecakapan Keterampilan**

Ketika masyarakat sudah sadar dan mau berubah, langkah selanjutnya adalah memberikan mereka pelatihan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemberdayaan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

3. **Peningkatan Kemampuan Intelektual**

Masyarakat yang sudah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan harus terus belajar dan berlatih agar kemampuannya semakin terasah. Hal ini akan mendekatkan mereka pada kemandirian.

Adapun tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukmino Adi (2003) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yaitu petugas dan tim lapangan harus memiliki pemahaman yang sama tentang metode yang akan dipakai untuk memberdayakan masyarakat. Mereka juga perlu melakukan kajian mendalam terhadap kondisi dan potensi daerah yang menjadi target program.
2. Tahap Assesment, merupakan tahap identifikasi masalah dan identifikasi sumber daya yang ada di masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, yaitu pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di komunitas mereka dan bersama-sama mencari solusi yang paling tepat.
4. Tahap Formulasi Rencana Aksi, yaitu memformulasikan program dalam bentuk tulisan oleh fasilitator untuk dijadikan proposal yang akan ditujukan kepada pihak penyandang dana.
5. Tahap Pelaksanaan, yaitu pengimplementasian program oleh masyarakat sasaran dengan bantuan fasilitator.
6. Tahap Evaluasi, dimana pelaksanaan program pemberdayaan harus mendapat pengawasan dari masyarakat maupun fasilitator.
7. Tahap Terminasi, dilakukan ketika masyarakat yang dibantu sudah mampu mengatasi masalah mereka sendiri dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, program juga bisa berakhir jika pendanaan dari pihak luar sudah tidak ada lagi.

Sedangkan tahapan pemberdayaan menurut Wilson (dalam Cahya, 2021) antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki diri; dan
2. Mendorong masyarakat untuk berani mengambil tindakan dan terlibat dalam perubahan.

Selain dua tahap di atas, Wilson juga memberikan empat tahap pemberdayaan (Firdausi, 2020), yaitu:

1. *Awakening* (penyadaran) yaitu masyarakat dibantu untuk menyadari potensi diri dan bersama-sama merancang masa depan yang lebih baik.
2. *Understanding* (pemahaman) yaitu masyarakat diberi pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi, dan keadaan umum lainnya.
3. *Harnessing* (pemanfaatan) yaitu masyarakat yang sudah sadar dan mengerti selanjutnya diarahkan untuk memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya.
4. *Using* (menggunakan) yaitu masyarakat yang sudah diberdayakan kemudian menggunakan kemampuan dan keterampilannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dedeh Maryani (dalam Firdausi, 2020) juga menyebutkan tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu:

1. Tahap Persiapan, yaitu persiapan dilakukan menyiapkan petugas, dalam hal pemberdayaan adalah tenaga pemberdayaan masyarakat, dan penyiapan lapangan yang dilakukan secara non direktif.
2. Tahap Pengkajian, dilakukan oleh petugas pemberdayaan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan sumberdaya yang dimiliki. Pengkajian ini dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, dimana petugas pemberdayaan perlu mengajak masyarakat untuk berpikir bersama tentang masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi yang tepat, misalnya dengan membuat program atau kegiatan bersama.
4. Tahap Performalisasi Rencana Aksi, yaitu petugas membantu warga menentukan program apa yang akan dilakukan dan menuliskannya dalam proposal untuk mendapatkan dana.
5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan, yaitu pengimplementasian program melalui kerjasama antara petugas dengan masyarakat.
6. Tahap Evaluasi, yaitu pelibatan warga untuk bersama-sama mengevaluasi program, agar mereka bisa mengawasi jalannya program secara mandiri dan menjalin komunikasi yang lebih baik.
7. Tahap Terminasi, adalah pemutusan hubungan secara formal antara petugas pemberdayaan dengan masyarakat atau komunitas pemberdayaan. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak ketergantungan dan mencapai kemandirian yang diinginkan.

Tabel 1. 5 TEORI PROSES PEMBERDAYAAN

Penelitian Saiful Iqbaludin (2022)	Penelitian Syafiqa Fakhrun Nisa (2020)	Penelitian Madania Cahya Rani (2021)	Penelitian GU Rui & NIE Feng-ying (2021)
Teori Proses Pemberdayaan (Fahrudin, 2012): - Enabling; - Empowering; - Protecting.	Teori Tahapan Pemberdayaan (Dedeh Maryani, dkk) Tahap Persiapan - Tahap Pengkajian - Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan - Tahap Performalisasi Rencana Aksi Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan - Tahap Evaluasi - Tahap Terminasi	Teori Tahapan Pemberdayaan (Ambar Teguh Sulistiyani, 2017): - Tahap Penyadaran; - Tahap Transformasi; - Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual.	Tahap Pemberdayaan perempuan: - Examine the program has positive effects on women's empowerment and poverty reduction simultaneously at the household level. - Examine the program has positive effects on women's empowerment and poverty reduction simultaneously at the individual level. - Discuss the empowerment process under different gender-specific interventions such as training, cooperatives, and

			micro-credit services.
Teori Tahap Pemberdayaan (Wrihatnolo, 2007): a. Penyadaran; b. Pengkapasitasan; c. Pemberian Daya	Tahap Proses Pemberdayaan (Wilson): a. <i>Awakening</i> (penyadaran); b. <i>Understanding</i> (pemahaman); c. <i>Harnessing</i> (memanfaatkan); d. <i>Using</i> (menggunakan).	- Siklus Pemberdayaan (Wilson): a) Menumbuhkan rasa keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki diri; b) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan dirinya dari hambatan-hambatan yang dirasakan untuk mengambil keputusan.	

Diskursus teori merupakan suatu metode atau sistem berpikir dan gambaran yang membantu membangun konsep suatu kultur atau budaya (Foucault, 1928). Diskursus teori juga berarti suatu cara pandang untuk memahami dan menilai suatu masalah. Diskursus teori dipilih dalam penelitian ini karena penulis ingin menyesuaikan teori dengan data yang akan dicari. Oleh karena itu, teori proses pemberdayaan hasil dari diskursus yang sudah dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil 2 teori tahap pemberdayaan milik Dedeh Maryani, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan program atau kegiatan, serta mengambil teori tahap pemberdayaan milik Wrihatnolo (2007), yaitu tahap penyadaran dan tahap pengkapasitasan. Sehingga proses pemberdayaan di Komunitas Rajut Erwela dalam penelitian ini yaitu: 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Penyadaran; 3) Tahap Pengkapasitasan; dan 4) Tahap Pelaksanaan Program.

1.6.5.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan itu sendiri. Faktor-faktor pendukung pemberdayaan menurut Margayaningsih (2018) adalah:

1. Motivasi

Motivasi berarti kekuatan pendorong yang berasal dari diri individu maupun lingkungan sekitar yang menginspirasi seseorang untuk melakukan tindakan atau perubahan yang positif (Hamzah B. Uno, 2007: 9). Motivasi juga diartikan sebagai kondisi psikologis yang memicu dan mengarahkan perilaku individu. Kondisi ini ditandai dengan adanya dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bertindak (Hamzah B. Uno, 2007: 10).

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah hasil dari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (D.A. Sumantri, 2002).

Adapun faktor-faktor penghambat pemberdayaan menurut Margayaningsih (2018) yaitu:

1. Anggaran

Anggaran adalah suatu perencanaan keuangan yang komprehensif dan menyajikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam periode waktu tertentu (Munandar, 2011). Anggaran juga dapat diartikan

sebagai jumlah modal yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu instansi atau kelompok tertentu untuk melaksanakan pembangunan. Anggaran menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan bagi kelompok pemberdayaan untuk melakukan perubahan melalui pemberdayaan karena dengan anggaran yang cukup, maka kelompok pemberdayaan dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk keberhasilan pemberdayaan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mencakup sumber daya manusia, alat, bahan, metode, ruangan, struktur organisasi, dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai akan memudahkan proses pemberdayaan dan dapat mencapai tujuan yaitu kemandirian. Akan tetapi, jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka kelompok pemberdayaan akan kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut.

1.6.6 Kemiskinan

1.6.6.1 Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Parsudi Suparlan (dalam Nurjanah et al., 2022) adalah sekelompok orang yang tidak dapat mencapai standar hidup masyarakat umum atau memiliki standar hidup yang rendah karena kekurangan materi yang mempengaruhi keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong kelompok miskin.

Menurut Shirazi dan Pramanik (dalam Mualifah, 2019) kemiskinan adalah keadaan ketika sumberdaya yang dimiliki oleh seorang individu

tidak cukup untuk mendapatkan hidup yang nyaman dalam ekonomi, sosial, psikologis, dan dimensi spiritual.

Maipita (dalam Maulana, 2019) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

1. Standar kebutuhan hidup layak yang berarti terpenuhinya segala kebutuhan pokok. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi artinya seseorang tersebut berada pada kemiskinan absolut.
2. Tingkat pendapatan dimana kemiskinan disebabkan karena pendapatan yang kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah standar hidup layak karena kurangnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan produksi sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok, seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, hingga harga diri.

1.6.6.3 Dampak Kemiskinan

Kemiskinan memiliki akibat dari dampak menurut Mubyarto (1999:20), yaitu:

1. Pengangguran

Kemiskinan membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, serta kualifikasi yang tidak memenuhi. Akibatnya banyak masyarakat miskin yang menjadi pengangguran atau hanya bekerja serabutan.

2. Kriminalitas

Masyarakat miskin yang sulit mencari nafkah akhirnya melakukan segala cara agar tetap dapat menyambung hidup, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti kriminalitas.

3. Putus Sekolah

Biaya pendidikan yang mahal membuat masyarakat miskin banyak yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Akibatnya, masyarakat miskin tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk nantinya bersaing di pasar kerja. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang baik menjadi lebih sedikit dan mereka terus berada di dalam lingkaran kemiskinan.

4. Kesehatan

Dampak dari kemiskinan lainnya yaitu rendahnya tingkat kesehatan akibat tidak terpenuhinya gizi yang cukup. Masyarakat miskin juga tidak jarang tinggal di tempat yang tidak layak dengan tingkat kebersihan yang rendah. Akibatnya, mereka menjadi mudah jatuh sakit namun tidak mampu untuk melakukan pengobatan karena biaya yang tidak murah.

1.6.7 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

1.6.7.1 Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional untuk menanggulangi kemiskinan dengan basis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengadopsi

program pengentasan kemiskinan sebelumnya yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudah menjalankan konsep pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Dalam P2KP, masyarakat disiapkan untuk menjadi mandiri melalui pembentukan lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar, dan kondusif bagi perkembangan modal sosial di masa yang akan datang. P2KP kemudian diadopsi dan menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007 yang mendukung upaya peningkatan IPM serta berupaya untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50% pada tahun 2015 sesuai tujuan MDGs.

Pelaksanaan PNPM Mandiri yaitu dilakukan melalui harmonisasi sistem, penyediaan pendamping teknis, dan pemberian insentif keuangan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2007). Dalam PNPM Mandiri, masyarakat diberdayakan melalui peningkatan kapasitas agar dapat memecahkan persoalannya sendiri dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Namun demikian, pemerintah daerah tetap harus terlibat dalam setiap prosesnya untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan dari hasil yang telah dicapai. PNPM Mandiri berupaya untuk menjadikan masyarakat miskin yang lebih berdaya dan madani sehingga nantinya tercapai kemandirian dan keluar dari kemiskinan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PNPM Mandiri merupakan sebuah program nasional untuk menekan angka kemiskinan

melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial atau kapital sosial sehingga terjadi kebersamaan dan kesatuan dari masyarakat untuk mengatasi persoalannya serta mencapai kemandirian dan keluar dari kemiskinan

1.6.7.2 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Tujuan dari PNPM Mandiri sebagaimana yang tercantum di dalam Pedoman Umum PNPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin. Adapun tujuan khusus dari PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat rentan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dan tepat sasaran, meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan modal sosial masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

1.6.7.3 Prinsip Dasar PNPM Mandiri

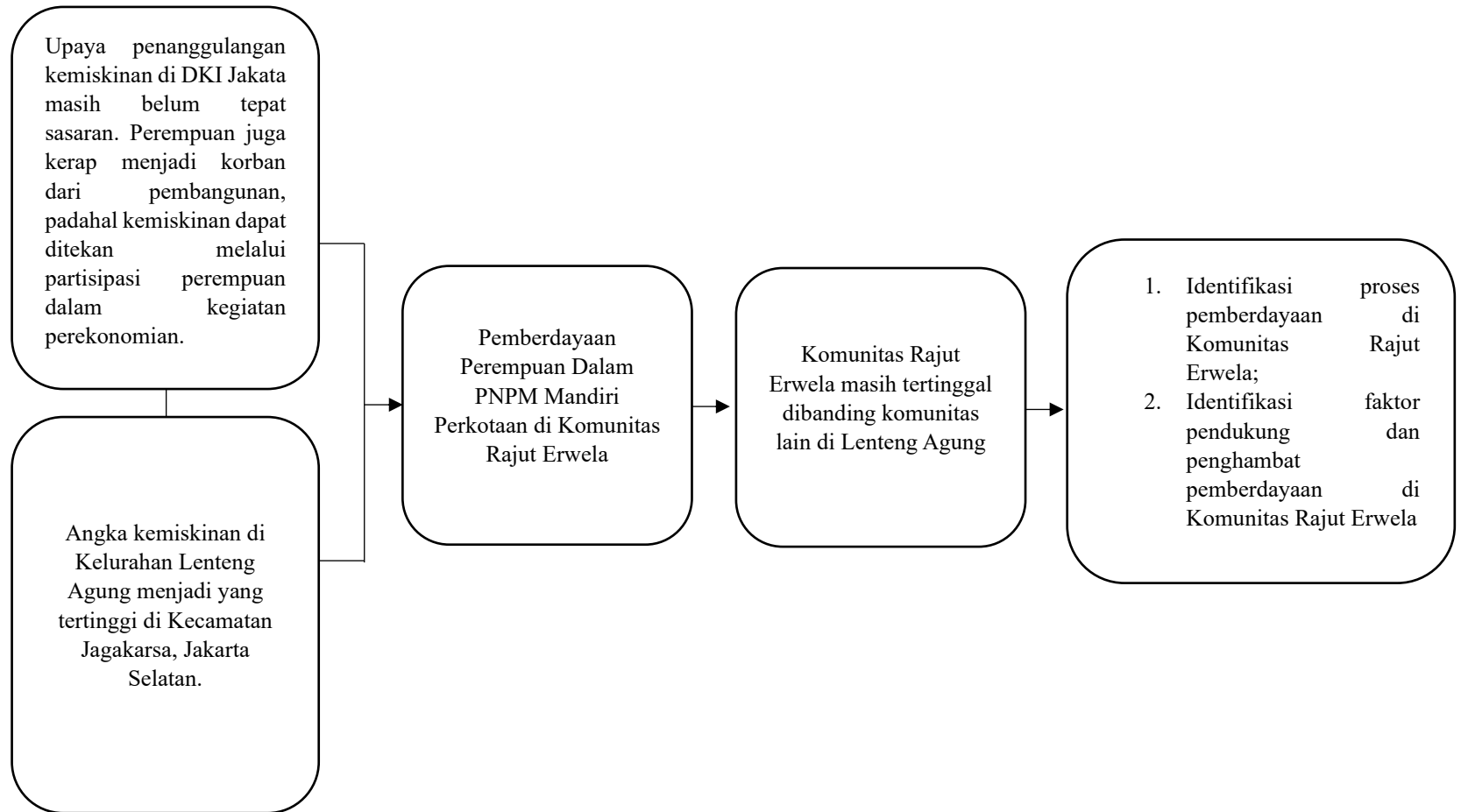
Prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri yang tertuang dalam Panduan Umum PNPM Mandiri adalah:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, dimana PNPM Mandiri berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

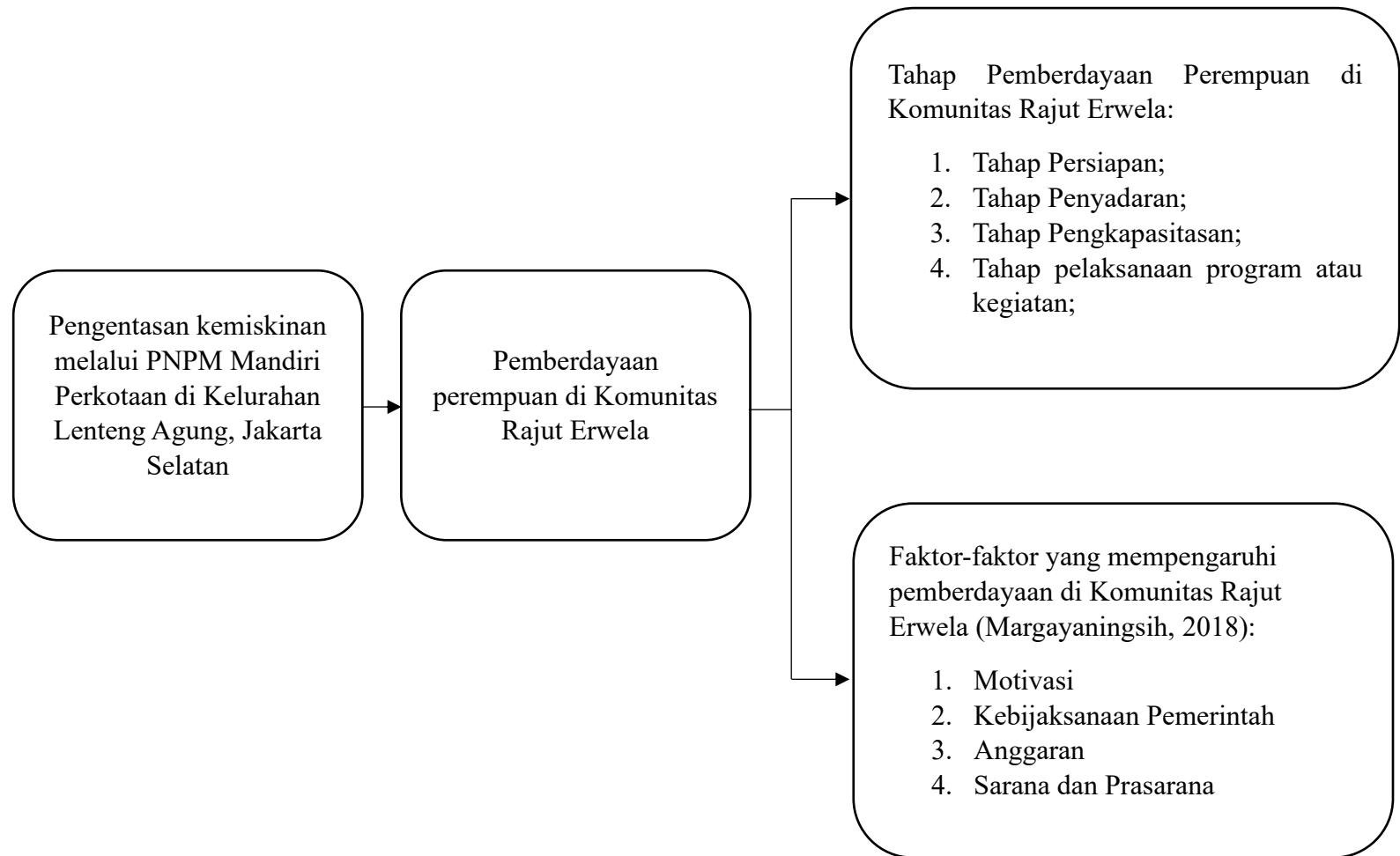
2. Otonomi, yaitu kewenangan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola kegiatan pembangunan sectoral dan kewilayahan.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin menjadi subjek dan objek pembangunan yang kepentingan dan kebutuhannya dipentingkan dan diperjuangkan.
5. Partisipasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan bergotong royong melaksanakan pembangunan.
6. Kesetaraan dan Keadilan gender, yaitu kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya secara adil dan setara.
7. Demokratis, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan Akuntabel, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, legal, dan administratif.
9. Prioritas, dimana pemenuhan kebutuhan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

10. Kolaborasi, kerjasama pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menanggulangi kemiskinan.
11. Keberlanjutan, yaitu pertimbangan kepentinganpeningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus melihat jangka panjang dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sederhana, yaitu aturan-aturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri harus dibuat sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan masyarakat.

1.6.8 Kerangka Pemikiran



1.6.9 Kerangka Teori



1.7 FENOMENA PENELITIAN

Pengertian pemberdayaan menurut Ahmad & Sudha, n.d., (2022) yaitu mengacu pada proses penyediaan kebutuhan sumberdaya perempuan dan peluang untuk menggunakan hak-hak mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki kendali atas kehidupan mereka. Menurutnya pemberdayaan perempuan juga termasuk pada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik.

1. Proses pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap persiapan, dimana pada tahap ini disiapkan lapangan atau sasaran kelompok yang akan dilakukan pemberdayaan. Aspek yang digali pada tahap ini adalah:

- a. Proses penunjukkan petugas pemberdayaan dan bagaimana kompetensinya dalam mengurus persoalan pemberdayaan di lapangan.
- b. Kemampuan petugas pemberdayaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SOP-nya dan mekanisme reward and punishment yang diberikan sebagai motivasi meningkatkan kinerja.
- c. Proses penentuan lokus pemberdayaan oleh pemerintah dengan memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2) Tahap penyadaran, dimana berupaya untuk menyadarkan perempuan agar menjadi aktor dalam peningkatan perekonomian keluarga dan

keluar dari kemiskinan. Aspek yang digali pada tahap penyadaran ini adalah:

- a. Kemampuan petugas pemberdayaan dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi pada masyarakat khususnya perempuan terkait kegiatan pemberdayaan.
 - b. Peningkatan kesadaran perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya melalui kegiatan pemberdayaan.
 - c. Partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan *brainstorming* untuk menggali ide dan solusi perempuan untuk memecahkan masalah.
- 3) Tahap pengkapasitasan, dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan *workshop*. Aspek yang digali pada tahap ini yaitu:
- a. Kemampuan petugas pemberdayaan dalam memberikan kapasitas kepada perempuan melalui pelatihan keterampilan.
 - b. Proses pelatihan keterampilan, dampak pelatihan, dan kendala yang terjadi selama proses pelatihan keterampilan.
- 4) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, dimana perempuan yang telah memiliki *skill* atau keahlian selanjutnya diarahkan untuk melaksanakan program pemberdayaan yaitu produksi barang-barang rajut yang dapat diperjualbelikan secara luas. Aspek yang digali dari tahap ini adalah:
- A. Proses produksi produk berserta kendala yang dihadapi oleh Komunitas Rajut Erwela.

- B. Perubahan pola hidup perempuan dan pembagian peran perempuan antara anggota komunitas dan ibu rumah tangga.
 - C. Mekanisme pemasaran produk, omzet dalam satu bulan, dan kemampuan menghadapi kompetitor atau pesaing.
 - D. Kemampuan Komunitas Rajut Erwela dalam mengelola keuangan komunitas agar terus memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi anggotanya.
2. Dalam proses pemberdayaan, penting untuk melihat apa saja faktor-faktor baik faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan tersebut untuk kemudian dirumuskan solusinya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan antara lain yaitu:

- a. Motivasi, yaitu keinginan dan kemauan dari dalam diri perempuan dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga untuk berubah. Adapun aspek yang digali dalam faktor motivasi yaitu:
 - a) Faktor yang mendasari perempuan dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.
 - b) Ekspektasi dan komitmen perempuan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan hingga selesai.
 - c) Pengaruh lingkungan dalam membentuk motivasi perempuan.
- b. Kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan dari pemerintah setempat, baik pemerintah kelurahan Lenteng Agung hingga pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendukung program pemberdayaan

di Komunitas Rajut Erwela. Aspek yang digali dari kebijaksanaan pemerintah antara lain:

- a) Kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan berupa anggaran, promosi, dan lainnya.
 - b) Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik.
 - c) Kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan kapasitas perempuan.
- c. Anggaran, yaitu modal yang dialokasikan untuk mengembangkan produk dan komunitas. Aspek yang digali dalam faktor ini adalah:
- a) Pemberian modal dan bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk program pemberdayaan perempuan di Komunitas Rajut Erwela.
 - b) Mekanisme pemberian modal dan bantuan dan kendala anggaran yang dihadapi Komunitas Rajut Erwela.
 - c) Pengaruh bantuan modal terhadap produktivitas Komunitas Rajut Erwela.
- d. Sarana dan prasarana, yaitu berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam produksi barang-barang rajut. Aspek yang digali dalam faktor sarana dan prasarana antara lain:
- a) Kemampuan pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas Komunitas Rajut Erwela.

- b) Kemampuan Komunitas Rajut Erwela untuk mengakses pasar yang lebih luas.
- c) Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasana yang memadai bagi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
- d) Kemampuan perempuan untuk terus berpartisipasi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

1.8 ARGUMEN PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan perempuan pada Komunitas Rajut Erwela dalam Program Nasional Pemberdayaan Perempuan (PNPM) Mandiri Perkotaan untuk menanggulangi angka kemiskinan. Peneliti berargumen bahwa pemberdayaan perempuan menjadi indikator penting dalam keberhasilan penurunan angka kemiskinan. Perempuan yang berdaya akan mampu dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan membantu menambah pendapatan keluarga. Komunitas Rajut Erwela merupakan salah satu komunitas pemberdayaan yang ada di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Komunitas tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta Selatan.

Selain untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan perempuan juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat, hingga partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan yang berdaya dan berkapasitas akan mampu meningkatkan pendidikan dan kualitas kesehatan keluarga. Perempuan yang berpartisipasi dalam politik akan memperjuangkan

hak-hak dan kesejahteraan perempuan lainnya. Namun, pada kenyataannya, pemberdayaan perempuan masih mengalami kendala dari perempuannya sendiri. Kendala dari perempuannya sendiri yaitu ibu-ibu rumah tangga prasejahtera kurang dapat mengasah kemampuan keterampilan yang telah diberikan (Noer, 2021). Ibu-ibu rumah tangga peserta pemberdayaan juga belum percaya diri untuk menghasilkan produk hasil karyanya dijadikan usaha (Firdausi, 2020).

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi maka diperlukan analisis terkait proses dan tahapan pemberdayaan perempuan melalui 4 tahap pemberdayaan berdasarkan diskursus teori yang sudah peneliti lakukan, yaitu tahap persiapan, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, tahap pelaksanaan program atau kegiatan.

Terdapat 4 faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pemberdayaan tersebut, yaitu motivasi, kebijaksanaan pemerintah, anggaran, dan sarana dan prasarana. Motivasi berkaitan dengan kemauan dalam diri perempuan untuk berubah dan mengikuti kegiatan pemberdayaan, faktor ini sesuai dengan kendala yang banyak terjadi pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya kebijaksanaan pemerintah yaitu berkaitan dengan intervensi pemerintah untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut, seperti misalnya pembuatan kebijakan yang mendukung perempuan, pemberian anggaran, membantu promosi, dan lain sebagainya. Faktor anggaran berkaitan dengan jumlah bantuan modal yang diberikan kepada komunitas pemberdayaan untuk kelancaran pemberdayaan. Anggaran harus mencukupi berbagai kebutuhan

komunitas agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, alat dan bahan, rumah produksi, kecukupan anggota, sarana promosi, dan sebagainya. Sarana dan prasarana juga masih menjadi kendala dalam beberapa penelitian terdahulu yang artinya keempat faktor tersebut harus terpenuhi dalam kegiatan pemberdayaan di Komunitas Rajut Erwela agar pemberdayaan perempuan mencapai keberhasilan.

1.9 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana uraian masalahnya dilakukan secara induktif. Pendekatan kualitatif berupaya menjelaskan masalah hingga menghasilkan kesimpulan dan sebuah teori baru. Pendekatan kualitatif juga merupakan penelitian yang harus dapat menjelaskan fenomena sosial yang sebenarnya terjadi berdasarkan '*frame of refence*' dan '*field of experience*' dari subjek yang diteliti sehingga dalam penelitian kualitatif harus bisa mengkaji setiap ucapan, uraian, dan tingkah laku yang diamati dari sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan *holistic*.

1.9.1 TIPE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan, program pemberdayaan perempuan yang sudah dilaksanakan, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

1.9.2 SITUS PENELITIAN

Situs penelitian harus ditetapkan karena sebuah penelitian dengan situs atau lokasi yang jelas akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian tersebut. Situs atau lokasi tidak hanya berpatok pada sebuah wilayah atau daerah, tetapi bisa juga pada sebuah lembaga atau organisasi. Pada penelitian ini, situs penelitiannya di Komunitas Rajut Erwela, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

1.9.3 FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada tahap-tahap pemberdayaan perempuan di Komunitas Rajut Erwela, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menanggulangi angka kemiskinan menggunakan 4 tahap pemberdayaan, yaitu tahap persiapan, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pelaksanaan kegiatan atau program. Penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, yaitu motivasi, kebijaksanaan pemerintah, anggaran, serta sarana dan prasarana.

1.9.4 SUBJEK PENELITIAN

Pemilihan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini melalui teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono 2012:54). Artinya informan dalam penelitian didapatkan melalui pertimbangan kriteria informan sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan yang

didapat dari *purposive sampling* adalah informan kunci dimana mereka mengetahui perihal kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Informan yang didapat dari teknik *purposive sampling* yaitu:

1. Kepala lurah Lenteng Agung
2. Ketua PKK Lenteng Agung
3. Ketua Komunitas Rajut Erwela

Adapun informan-informan lain yang terlibat dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan data tambahan apabila informasi yang didapatkan dari informan kunci belum memuaskan atau memenuhi kebutuhan informasi.

Teknik *snowball sampling* adalah teknik ketika jumlah informan yang awalnya hanya sedikit menjadi membesar dan terus membesar karena peneliti terus berupaya mencari informan lain untuk melengkapi data yang diinginkan (Sugiyono, 2017: 218-219).

1.9.5 JENIS DATA

Jenis data kualitatif dipakai dengan menyajikan data berbentuk kata dan uraian, bukan angka (Muhadjir, 1998). Data kualitatif juga menggunakan symbol-simbol, tingkah laku, atau gestur yang ditunjukkan oleh subjek penelitian pada saat observasi. Oleh karenanya data kualitatif hanya dapat diukur secara tidak langsung. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

1.9.6 SUMBER DATA

Sumber data primer dan sekunder dipilih untuk membantu penelitian ini.

1. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari informan terpilih, yaitu ketua UP2K Erwela, Lurah Lenteng Agung, dan ketua PKK Lenteng Agung. Mereka dipilih sebagai aktor yang memberi bantuan dan menerima bantuan sehingga didapatkan informasi yang lengkap dari sudut pandang yang menyeluruh.
2. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan dari pihak lain. Data sekunder diperoleh dari kegiatan studi pustaka dan studi dokumentasi dan artikel.

1.9.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yang diantaranya yaitu:

1. Wawancara kepada para informan atau narasumber untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.
2. Teknik observasi yaitu mengamati kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat miskin sekaligus mencatatnya sebagai bukti tertulis.
3. Teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar-gambar yang dibutuhkan, membaca dokumen-dokumen tertulis seperti buku, artikel, foto, catatan harian, dan sebagainya.

1.9.8 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Analisis deskriptif yang telah dilakukan akan mengumpulkan data-data yang kemudian perlu diolah dan dianalisa dengan memberi penafsiran

berupa uraian di atas. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti harus melakukan penyederhanaan terhadap data tersebut dengan menetapkan hal-hal yang pokok dan sesuai dengan fokus penelitian atau yang biasa disebut dengan reduksi data.

2. Penyajian Data

Analisis data dilanjutkan dengan penyajian data yaitu mengorganisasikan atau mengkategorisasi data yang telah direduksi tersebut untuk mempermudah analisis dan penyimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan menguraikan data secara singkat atau sejenisnya yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah direduksi dan diorganisir dalam penyajian data kemudian ditarik kesimpulannya. Kesimpulan yang didapat diharapkan merupakan temuan baru dan menambah khazanah keilmuan baru. Kesimpulan juga sedapat mungkin menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis.

1.9.9 KUALITAS DATA

Untuk mendapatkan kualitas data yang kredibel, maka diperlukan analisis kredibilitas dan otentisitas dari realitas. Analisis kredibilitas tersebut dilakukan dengan beberapa hal: (Sugiyono, 2019).

1. *Credibility* (validitas internal)

Menurut Sugiyono (2019) untuk menguji *credibility* dilakukan dengan beberapa hal, yaitu 1) Menambah waktu dan kegiatan pengamatan difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh dengan pengecekan lapangan kembali. Data tersebut harus sama dan tidak berubah antara setelah diperoleh dengan setelah pengecekan ulang. Jika datanya sudah sama, artinya sudah kredibel dan waktu perpanjangan pengamatan dapat dihentikan. 2) Peningkatan ketekunan dilakukan untuk kepastian data dan deskripsi sudah benar dan dapat dicatat dengan baik. Peningkatan ketekunan juga dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, *state of the art*, atau dokumentasi yang berkaitan. 3) Triangulasi adalah kegiatan mengecek atau meninjau ulang data dari banyak sumber dengan cara dan waktu yang beragam. Triangulasi dibedakan kembali menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 4) Analisis kasus negative dilakukan dengan mencari kasus yang berbeda dengan temuan di lapangan untuk memastikan apakah data yang diperoleh di lapangan sudah benar. Jika tidak ditemukan kasus yang berbeda, berarti data tersebut sudah dapat dipercaya. 5) Menggunakan bahan referensi berupa foto-foto atau dokumentasi autentik untuk dapat lebih meyakinkan. 6) *Member check* untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Gunanya agar tidak terjadi kekeliruan penulisan laporan dengan apa yang dimaksud narasumber.

2. *Transferability* (validitas eksternal)

Selain validitas internal, validitas eksternal juga dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjukkan derajat ketepatan hasil penelitian kepada populasi dari tempat sampel diambil. Pada situasi sosial yang berbeda dalam penelitian, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan karena nilai tranfer tersebut sangat bergantung pada si pengguna.

3. *Dependability* (reabilitas)

Artinya bahwa setelah dilakukan beberapa percobaan dan hasilnya selalu sama, maka data hasil penelitian dapat dipercaya.

4. *Confirmability* (obyektivitas)

Confirmability berarti menguji kesesuaian hasil dari penelitian dengan proses yang telah dilakukan. Penelitian dikatakan objektif apabila hasilnya disetujui oleh khalayak umum.

Dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian terkait “Pemberdayaan Perempuan melalui Komunitas Rajut Erwela dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan” ini kualitas data yang diaplikasikan adalah triangulasi sumber. Penggunaan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapat data-data yang dibutuhkan kepada informan yang hasilnya akan dideskripsikan, dikategorisasikan, dan diambil kesimpulan.